

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Hasil Penelitian

Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui respons mitigasi perpustakaan terhadap bencana banjir di Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Provinsi Kalimantan Selatan. Pengumpulan data pada penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan menggunakan teknik pengumpulan data berupa observasi, wawancara dan dokumentasi. Setelah melakukan pengumpulan data terhadap narasumber dari staf perpustakaan dari bagian perencanaan dan pelaporan, staf perpustakaan dari bagian layanan anak dan pustakawan dari bagian layanan umum yang telah bekerja di Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Provinsi Kalimantan Selatan sebelum terjadinya peristiwa bencana banjir kemudian menghadapi secara langsung pada saat terjadinya peristiwa bencana banjir tersebut sehingga mengetahui dan menyaksikan hal-hal terkait mitigasi bencana di Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Provinsi Kalimantan Selatan sebelum dan setelah bencana, maka langkah selanjutnya adalah mengolah dan menyajikan data.

Mitigasi bencana di dalam Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 merupakan serangkaian upaya untuk mengurangi risiko bencana, baik melalui pembangunan fisik maupun penyadaran dan peningkatan kemampuan menghadapi ancaman bencana. Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Provinsi Kalimantan dalam menghadapi peristiwa banjir di tahun 2021 melakukan beberapa pertolongan pertama terkait penyelamatan

bahan pustaka dan aset-aset di perpustakaan. Hal ini disampaikan dalam wawancara oleh staf perpustakaan bagian layanan anak yang menyatakan sebagai berikut:

“Kalau pertolongan pertama, ya, kita sisihkan dulu buku-buku yang mendekati banjir. Kayak kemarin kan banjirnya sudah sampai mata kaki. Istilahnya rak paling bawah sudah kita amankan sama rak paling kedua karena prediksi kita pasti naik terus airnya. Nah itu mitigasi pertama adalah mengamankan buku-buku yang kiranya akan terdampak banjir. Itu sih kalau tentang buku-buku, ya. Yang kedua kalau buku-buku itu sudah terkena banjir, itu lapornya ke bagian aset. Nanti bagian aset itu yang mengidentifikasi lagi buku-buku yang tidak layak lagi untuk dilayankan atau diamankan.”⁷³

Maksud dari pernyataan staf perpustakaan dari wawancara di atas adalah kegiatan mitigasi yang dilakukan sebagai pertolongan pertama dalam menghadapi bencana banjir di perpustakaan yaitu dengan menyisihkan buku-buku yang paling berisiko terdampak banjir dari rak paling bawah pertama dan kedua agar dapat meminimalisir kerugian yang diterima. Adapun buku-buku yang sudah terkena banjir maka pihak yang menangani berikutnya adalah dari bagian aset yang bertugas mengidentifikasi buku-buku tersebut untuk diseleksi apakah buku tersebut masih layak digunakan atau tidak. Jika masih layak maka buku tersebut dapat diperbaiki terlebih dahulu dan dilayankan lagi. Namun, jika buku tersebut tidak bisa diperbaiki lagi maka buku tersebut akan diamankan terlebih dahulu untuk ditindaklanjuti kemudian.

Selain pertolongan pertama terhadap buku-buku pada saat terjadinya peristiwa bencana, Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Provinsi Kalimantan Selatan juga melakukan evakuasi terhadap fasilitas-fasilitas seperti komputer, rak-rak buku, meja,

⁷³ Wawancara dengan RS, Staf Perpustakaan Bagian Layanan Anak (Kids Library), 16 Januari 2023 pukul 11.10 WITA.

kursi yang ada di perpustakaan bagian Layanan Anak yang terdampak secara langsung peristiwa bencana banjir di tahun 2021. Hal ini sesuai dengan hasil dokumentasi dari media berita Radar Banjarmasin juga hasil wawancara dengan staf perpustakaan berikut ini:

“Komputer-komputer, sama. Semua diamankan. Rak-rak, kursi, meja, semua diamankan, dievakuasi.”⁷⁴



Gambar 4. 1 barang yang dievakuasi akibat banjir di tahun 2021

Berdasarkan gambar 4.1 dan hasil wawancara di atas menunjukkan bahwa barang-barang di Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Provinsi Kalimantan Selatan yang berisiko terendam banjir segera diamankan dan dievakuasi. Hal tersebut dilakukan

⁷⁴ Wawancara dengan RS, Staf Perpustakaan Bagian Layanan Anak (Kids Library), 16 Januari 2023 pukul 11.13 WITA.

untuk mencegah kerusakan pada fasilitas dan bahan pustaka beserta dokumen-dokumen penting lainnya dari risiko kerugian yang lebih parah lagi.

Untuk kegiatan perlindungan lainnya dari risiko kerugian bencana di dalam perpustakaan, Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Provinsi Kalimantan Selatan juga melakukan kegiatan fumigasi terhadap bahan pustaka secara periodik. Hal ini disampaikan oleh seorang pustakawan pertama dari bagian layanan umum yang menyatakan:

“Iya, setuju kami kan di layanan ini yaitu tentang fumigasi. Kan semua layanan ditutup dulu. Tidak ada peminjaman, tidak ada pengembalian, tidak ada layanan lah. Terus ini ruangan di fumigasi semua, diasapi semua itu untuk mengurangi dan meminimalisir perkembangan rayap pada buku dan rak. Itu secara periodik setahun sekali. Jadi paling tidak, bisa tahan lama lah rak, buku-buku yang sudah tua masih bisa dipakai.”⁷⁵

Maksud pernyataan pustakawan dari wawancara di atas adalah kegiatan pengurangan risiko bencana lainnya yang dilakukan di Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Provinsi Kalimantan Selatan adalah dengan melakukan fumigasi atau pengasapan untuk mengurangi dan meminimalisir kerusakan bahan pustaka dan fasilitas lainnya di perpustakaan akibat serangga seperti rayap dan lain sebagainya. Kegiatan fumigasi ini dilakukan secara periodik yaitu setahun sekali agar buku-buku dan sarana prasarana di perpustakaan di perpustakaan bisa bertahan lama.

Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Provinsi Kalimantan Selatan yang dalam hal ini satu unit dinas dengan Dinas Arsip dan Perpustakaan Daerah Kota Banjarbaru juga

⁷⁵ Wawancara dengan H, Pustakawan Pertama dari Bagian Layanan Umum, 16 Januari 2023 pukul 11.58 WITA.

mengadakan program kegiatan mitigasi bencana berupa program sosialisasi mengenai penyelamatan dan perlindungan arsip pasca bencana. Program ini berskala provinsi dengan kegiatan tentang penyelamatan dan perlindungan arsip pasca bencana. Hal ini disampaikan dalam hasil wawancara berikut ini:

“Terkait mitigasi bencana, kita ada kegiatan program dari kearsipan yang satu kesatuan dinas perpustakaan dan kearsipan, memiliki dua bidang, bidang perpustakaan dan bidang kearsipan. Nah di bidang kearsipan itu kan menyangkut arsip-arsip yang harus dijaga, dilestarikan. Di situ kan kita mengingat musibah kemarin, banjir, jadi ada kita bikin program baru tahun 2022 mengenai Perlindungan dan Penyelamatan Arsip Akibat Bencana, itu bencananya skala provinsi. Di dalam program itu ada kegiatan lagi, salah satu kegiatannya yaitu Perlindungan dan Penyelamatan Arsip terhadap Bencana.”⁷⁶

Maksud dari wawancara di atas adalah Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Provinsi Kalimantan Selatan bekerjasama dengan Dinas Arsip dan Perpustakaan Kota Banjarbaru untuk mengadakan kegiatan sosialisasi penyelamatan arsip akibat bencana. Program ini merupakan program gabungan yang berskala provinsi dengan lebih berfokus kepada perlindungan arsip pasca bencana.

Kegiatan mitigasi bencana lainnya yang dilakukan oleh Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Provinsi Kalimantan Selatan adalah melalui pembangunan fisik bangunan perpustakaan dan perawatan buku perpustakaan yang rusak akibat terdampak bencana banjir di tahun 2021. Hal ini disampaikan dalam wawancara berikut ini:

⁷⁶ Wawancara dengan MGA, Staf Perpustakaan Bagian Perencanaan dan Pelaporan, 06 Januari 2023 pukul 10.15 WITA.

“Kalau perpustakaan paling mengenai struktur bangunan aja, perawatan buku yang mungkin terkena banjir kan ada perawatan lagi, pemulihan lah di bagian pelestarian sana. Jadi mereka yang menyelamatkan buku-buku rusak.”⁷⁷

Maksud dari wawancara di atas adalah Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Provinsi Kalimantan Selatan telah melakukan pengaturan pembangunan terhadap struktur bangunan perpustakaan untuk minimalisir risiko kemungkinan bencana. Selain itu, untuk buku-buku yang mengalami kerusakan akibat banjir dirawat dan dipulihkan di bagian pelestarian untuk kemudian dapat dilayankan kembali.

Adapun dalam proses pelaksanaan mitigasi bencana ini, Dinas perpustakaan dan Kearsipan Provinsi Kalimantan Selatan masih belum memiliki Standar Operasional Pelaksanaan yang baku atau tertulis secara khusus. Hal ini disampaikan oleh staf perpustakaan dari bagian layanan anak yang menyebutkan:

“SOP secara khusus yang tertulisnya tidak ada sih, menurutku.”⁷⁸

Hal yang serupa disampaikan juga oleh pustakawan pertama dari bagian layanan umum yang menyatakan:

“Sepengetahuan kami tidak pang, sepengetahuan kami.”⁷⁹

⁷⁷ Wawancara dengan MGA, Staf Perpustakaan Bagian Perencanaan dan Pelaporan, 06 Januari 2023 pukul 10.17 WITA.

⁷⁸ Wawancara dengan RS, Staf Perpustakaan Bagian Layanan Anak (Kids Library), 16 Januari 2023 pukul 11.17 WITA.

⁷⁹ Wawancara dengan H, Pustakawan Pertama dari Bagian Layanan Umum, 16 Januari 2023 pukul 12.08 WITA.

Maksud dari kedua hasil wawancara di atas adalah Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Provinsi Kalimantan Selatan tidak memiliki Standar Operasional Pelaksanaan khusus atau tertulis untuk kegiatan mitigasi bencana.

Adapun pada wawancara dengan staf perpustakaan bagian perencanaan dan pelaporan tentang SOP mitigasi bencana secara khusus di Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Provinsi Kalimantan Selatan disampaikan pernyataan sebagai berikut:

“Kalau di perpustakaan sendiri tidak ada sih SOP yang secara khusus. Karena kemarin masih bisa diantisipasi. Untuk SOP di perpustakaan saat ini masih dalam bentuk draf untuk diajukan ke gubernur.”⁸⁰

Maksud dari wawancara di atas adalah saat ini Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Provinsi Kalimantan Selatan masih belum memiliki SOP khusus terkait mitigasi bencana karena masih dalam bentuk draf untuk diajukan kepada gubernur agar dapat disahkan kemudian.

Selain dari hal-hal di atas, Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Provinsi Kalimantan Selatan menjalin hubungan kerjasama lain dengan beberapa instansi terkait kebencanaan. Hal ini disampaikan dalam wawancara bersama pustakawan pertama dari bagian layanan umum sebagai berikut:

“Ada. Terkait bencana mungkin BPBD lah. Itu bila sudah terjadi bencananya. Itu ada lah buhannya membantu membersihkan membantu ini itu. Selain BPBD gak ada, kerjasamanya dengan karyawan sini aja untuk mengantisipasi bencana kemarin.”⁸¹

⁸⁰ Wawancara dengan MGA, Staf Perpustakaan Bagian Perencanaan dan Pelaporan, 06 Januari 2023 pukul 10.20 WITA.

⁸¹ Wawancara dengan H, Pustakawan Pertama dari Bagian Layanan Umum, 16 Januari 2023 pukul 12.10 WITA.

Maksud dari wawancara di atas adalah Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Provinsi Kalimantan Selatan menjalin hubungan kerjasama terkait kebencanaan dengan Dinas Penanggulangan Bencana Daerah pada saat peristiwa terjadinya bencana banjir di tahun 2021. Selain dengan BPBD, Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Provinsi Kalimantan Selatan lebih berfokus pada hubungan kerjasama dengan sesama karyawan di Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Provinsi Kalimantan Selatan.

Disampaikan juga melalui wawancara dengan staf perpustakaan bagian perencanaan dan pelaporan mengenai hubungan kerjasama dengan lembaga atau instansi yang dinyatakan sebagai berikut:

“Kalau instansi jelas bekerja sama dengan kabupaten/kota, Dinas Kearsipan Kabupaten Kota, kemudian dengan universitas, lembaga pemasyarakatan, Dinas Sosial, dan BPBD. Kegiatannya kebanyakan lebih mengarah kepada kerjasama layanan perpustakaan dibandingkan kebencanaan.”⁸²

Maksud dari wawancara di atas Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Provinsi Kalimantan Selatan telah membentuk serangkaian hubungan dengan instansi-instansi yang bergerak dalam bidang kebencanaan seperti Badan Penanggulangan Bencana Daerah. Akan tetapi dalam pelaksanaan kolaborasi kegiatan yang dilakukan bersama Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Provinsi Kalimantan Selatan masih mengarah kepada kerjasama layanan perpustakaan dibandingkan dengan kerjasama terkait mitigasi bencana.

⁸² Wawancara dengan MGA, Staf Perpustakaan Bagian Perencanaan dan Pelaporan, 06 Januari 2023 pukul 10.45 WITA.

Kegiatan mitigasi bencana di dalam Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 Pasal 47 Ayat 2 terdiri dari beberapa kegiatan meliputi penataan ruang, pengaturan pembangunan, pembangunan infrastruktur, tata bangunan, dan penyelenggaraan pendidikan, penyuluhan dan pelatihan baik secara konvensional maupun modern.

1. Penataan Ruang di Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Provinsi Kalimantan

Selatan

Ruang layanan di Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Provinsi Kalimantan Selatan yang secara langsung terdampak bencana banjir di tahun 2021 adalah ruang layanan anak. Hal ini dapat dilihat dari hasil dokumentasi berikut ini:



Gambar 4. 2 Bagian depan ruang layanan anak



Gambar 4. 3 Bagian dalam ruang layanan anak

Berdasarkan gambar 4.2 di atas menunjukkan bagian luar dari ruang layanan anak yang terdampak bencana banjir. Sedangkan gambar 4.3 di atas memperlihatkan ruang layanan anak yang terendam banjir hingga ke bagian dalam. Dapat dilihat bahwa sudah tidak ada lagi barang atau fasilitas seperti kursi atau meja di ruang layanan anak

karena sudah di evakuasi ke tempat yang lebih aman untuk mengurangi kerusakan akibat bencana. Berdasarkan hal tersebut, maka Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Provinsi Kalimantan Selatan perlu untuk melakukan penataan kembali terhadap ruang perpustakaan bagian layanan anak pasca terdampak bencana.

Dalam penataan ruang di dalam perpustakaan khususnya bagian yang terdampak banjir di tahun 2021 kemarin, penataannya masih disamakan dengan penataan ruangan seperti sebelum kejadian bencana. Hal ini disampaikan melalui wawancara oleh staf perpustakaan di Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Provinsi Kalimantan Selatan bagian layanan anak yang menyatakan sebagai berikut:

“Yang jelas, ini bangunan ditinggikan. Habis itu selokan diperbesar sehingga pembuangan air itu mudah ke bawah, terus pohon-pohon ditanami lagi supaya menyerap air. Itu sih, penanggulangannya lebih ke situ. Untuk dalam ruang, tetap aja tatanannya. Kada bisa dirubah-rubah selain fasilitasnya yang bertambah atau berganti seperti TV elektronik baru, edukasi anak baru, buku, buku baru, karena sebagian banyak yang rusak makanya diganti yang baru.”⁸³

Maksud dari wawancara di atas adalah penataan ruang di dalam ruang layanan anak yang terdampak banjir kemarin masih tetap sama seperti sebelum peristiwa bencana. Hal-hal yang dilakukan terhadap pengaturan ruang untuk meminimalisir risiko bencana di bagian layanan anak lebih ke arah pencegahan untuk menghindari risiko banjir lagi.

⁸³ Wawancara dengan RS, Staf Perpustakaan Bagian Layanan Anak (Kids Library), 16 Januari 2023 pukul 11.20 WITA.

Hal yang senada disampaikan juga oleh staf perpustakaan dari bagian perencanaan dan pelaporan sebagai berikut:

“Kemarin kalau penataan ruangnya tetap aja masih, kemarin ada sempit-sempit rusak sedikit kita lakukan perbaikan lagi, untuk saluran kita bersihkan, kita kerok lagi. Sama dengan sungai di depan itu kita kerok-kerok lagi juga, yang sampah-sampah yang menumpuk-numpuk lagi. Nah itu aja sih. Kalau tata ruang di dalamnya masih tetap seperti biasa. Lebih ke pencegahan agar tidak terdampak bencana.”⁸⁴

Maksud dari wawancara di atas adalah Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Provinsi Kalimantan Selatan masih menggunakan pengaturan tata ruang perpustakaan yang sama seperti sebelum kejadian bencana banjir pada tahun 2021. Meskipun demikian, Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Provinsi Kalimantan Selatan melakukan antisipasi terhadap ruangan-ruangan perpustakaan yang sebelumnya terdampak bencana banjir agar dapat mengurangi risiko terhadap bencana banjir yang dapat terjadi sewaktu-waktu. Antisipasi yang dilakukan yaitu dengan peninggian lantai ruang perpustakaan bagian layanan anak untuk meminimalisir risiko terjadinya banjir di ruang layanan anak. Hal ini sesuai dengan hasil dokumentasi berikut ini:



Gambar 4. 4 Bagian luar lantai ruang layanan anak



Gambar 4. 5 Lantai setelah pengecoran

⁸⁴ Wawancara dengan MGA, Staf Perpustakaan Bagian Perencanaan dan Pelaporan, 06 Januari 2023 pukul 10.23 WITA.

Menurut hasil dokumentasi di atas didukung dengan hasil observasi, lantai-lantai di ruang layanan anak yang dibuat lebih tinggi melalui pengecoran setelah peristiwa banjir di tahun 2021 kemarin sesuai dengan gambar 4.4 yang menunjukkan tampak depan ruang layanan anak dan gambar 4.5 yang memperlihatkan bagian dalam lantai ruang layanan anak setelah pengecoran. Hal ini dimaksudkan untuk mencegah masuknya air ke dalam ruangan agar dapat meminimalisir kemungkinan terjadinya banjir di ruang layanan anak lagi seperti yang pernah terjadi sebelumnya.

2. Pengaturan Pembangunan Bangunan Perpustakaan di Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Provinsi Kalimantan Selatan

Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Provinsi Kalimantan Selatan memiliki dua gedung bangunan baru yang dibangun pasca banjir di tahun 2021 yaitu gedung teater dan gedung perpustakaan disabilitas. Kedua bangunan tersebut dibangun dengan pondasi lebih tinggi dibandingkan bangunan-bangunan lama sebagai bentuk antisipasi jika terjadi banjir seperti sebelumnya. Hal ini disampaikan oleh staf perpustakaan bagian perencanaan dan pelaporan melalui wawancara sebagai berikut:

“Bangunannya dibuat lebih tinggi dibandingkan bangunan lama. Untuk bangunan-bangunan baru kita buat seperti itu. Pondasinya ditinggikan untuk mencegah banjir seperti yang pernah di alami. Dan Untuk bangunan lama yang pernah terkena banjir seperti di bagian layanan anak yang mengalami kerusakan parah akibat bencana kemarin, bagian dalamnya kami benahi dan untuk bagian lantai bangunan perpustakaan dilakukan renovasi dengan melakukan pengecoran untuk lebih meninggikan tinggi lantai dibandingkan sebelumnya.”⁸⁵

⁸⁵ Wawancara dengan MGA, Staf Perpustakaan Bagian Perencanaan dan Pelaporan, 06 Januari 2023 pukul 10.25 WITA.

Ditambahkan dengan hasil wawancara dengan pustakawan pertama dari bagian layanan umum sebagai berikut:

“Mungkin kalau bangunan baru tadi bisa lah mengaturnya. Kalau sudah lama seperti ini bagaimana? Paling tata ruangnya itu lah yang kita antisipasi. Sedikit-sedikit kita pastilah memperhitungkan aspek risiko bencana itu kan. Ketika itu memungkinkan untuk diatur ulang, pastilah, apalagi kalau itu bangunan baru kan pastilah diantisipasi. Paling tidak kan meminimalisir lah kemungkinan bencananya itu.”⁸⁶

Kedua hasil wawancara di atas didukung oleh hasil dokumentasi berikut ini:



Gambar 4. 6 Gedung Perpustakaan Disabilitas



Gambar 4.7 Gedung Teater

Berdasarkan hasil wawancara didukung oleh hasil dokumentasi di atas dan observasi peneliti sendiri, kedua gedung bangunan baru di Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Provinsi Kalimantan Selatan yaitu gedung perpustakaan disabilitas pada gambar 4.6 dan gedung teater pada gambar 4.7 di bangun pondasi dasar bangunan yang lebih tinggi dibandingkan bangunan lama untuk meminimalisir risiko masuknya banjir ke gedung baru perpustakaan. Adapun untuk bangunan yang baru, tidak mengalami

⁸⁶ Wawancara dengan H, Pustakawan Pertama dari Bagian Layanan Umum, 16 Januari 2023 pukul 12.16 WITA

perubahan yang signifikan terhadap pengaturan pembangunannya. Bangunan lama yang terdampak bencana seperti ruang layanan anak diberikan perbaikan dan pembaruan untuk meminimalisir risiko banjir melalui pengecoran lantai agar menjadi lebih tinggi daripada sebelum terjadinya bencana.

Bangunan-bangunan di Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Provinsi Kalimantan Selatan dibangun secara berkala hingga sekarang dengan pengaturan yang berbeda tergantung jenis gedungnya. Adapun Bangunan-bangunan yang telah dibangun beserta dengan keterangannya dapat dilihat melalui tabel berikut ini:

Tabel 4.1 Bangunan di Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Provinsi Kalimantan Selatan

No	Nama Gedung bangunan	Tahun	Kondisi Bangunan	Konstruksi Bangunan		Luas (M ²)
				Bertingkat/Tidak	Beton/Tidak	
1.	Gedung utama pelayanan	1992	Baik	Bertingkat	Beton	2800
2.	Gedung audio visual	2016	Baik	Bertingkat	Beton	567
3.	Gedung layanan audio visual	2021	Baik	Tidak	Tidak	470
4.	Perpustakaan Difabel	2021	Baik	Tidak	Tidak	620
5.	Ruang fumigasi	2007	Baik	Tidak	Tidak	42
6.	Rumah deposit	2019	Baik	Tidak	Beton	105
7.	Aula	1993	Baik	Tidak	Beton	747
8.	Kantin	1994	Baik	Tidak	Beton	97
9.	Mushala	1992	Baik	Tidak	Beton	58
10.	Pos jaga	1992	Baik	Tidak	Tidak	10,5
11.	Garasi mobil atap	2011	Baik	Tidak	Tidak	202
12.	Garasi belakang	2019	Baik	Tidak	Beton	80

Tabel 4.1 di atas menunjukkan bahwasanya gedung atau bangunan di Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Provinsi Kalimantan Selatan dibangun pada tahun-tahun yang berbeda dengan jenis konstruksi yang juga berbeda. Tabel di atas menunjukkan

bahwa ada beberapa bangunan yang dibangun dengan bahan beton sekaligus bertingkat namun ada pula yang dibangun tidak menggunakan bahan beton dan tidak bertingkat. Meskipun material bangunan yang digunakan pada beberapa gedung berbeda, semuanya dalam kondisi yang baik dan berada di dalam lingkungan Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Provinsi Kalimantan Selatan dengan luas bangunan yang berbeda-beda untuk setiap gedungnya.

3. Pembangunan Infrastruktur di Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Provinsi Kalimantan Selatan

Pasca bencana banjir di tahun 2021, Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Provinsi Kalimantan Selatan melakukan beberapa pengaturan ulang terhadap infrastruktur di lingkungan Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Provinsi Kalimantan Selatan. Beberapa infrastruktur yang dimaksud diantaranya pembangunan siring, pengecoran lantai perpustakaan, kemudian juga pemasangan bata press untuk menghindari genangan air. Hal ini disampaikan dalam wawancara dengan staf perpustakaan bagian perencanaan dan pelaporan sebagai berikut:

“Pembangunan siring, pengecoran lantai, peninggian lantai, kemudian pemasangan bata press di belakang supaya air tidak tergenang. Kebanyakan di lakukan pembangunan infrastruktur di layanan anak karena layanan anak kan di bawah kalau layanan umum di atas jadi tidak ada masalah.”⁸⁷

⁸⁷ Wawancara dengan MGA, Staf Perpustakaan Bagian Perencanaan dan Pelaporan, 06 Januari 2023 pukul 10.28 WITA.

Ditambahkan dengan hasil wawancara dengan pustakawan pertama bagian layanan umum yang menyebutkan:

“Kalau sudah banjir itu kan pastilah ada yang rusak-rusak karena banjir kemarin. Dinding-dinding kemarin ada lah yang jebol, sudahlah diperbaiki. Rak-rak yang rusak kemarin sudah diganti juga. Buku-buku yang basah sudah diseleksi lagi lah mana yang bisa dipakai mana yang tidak. Yang bisa diperbaiki kami perbaiki lah. Mungkin seperti itu saja.”⁸⁸

Menurut hasil wawancara di atas Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Provinsi Kalimantan Selatan melakukan pembangunan infrastruktur dengan lebih berfokus kepada perbaikan infrastruktur yang telah ada terutama pada bagian ruang layanan anak yang terdampak secara langsung bencana banjir di tahun 2021. Infrastruktur yang dibangun diantaranya pembangunan siring, pengecoran lantai dan pemasangan bata press untuk menghindari air menggenang yang dapat menyebabkan banjir. Selain itu, untuk fasilitas perpustakaan lainnya yang terdampak banjir seperti rak-rak buku, kursi, meja dan lain sebagainya diberikan perbaikan untuk yang masih bisa diperbaiki. Adapun yang sudah rusak parah diganti dengan barang yang baru.



Gambar 4.8 Rak buku setelah di cat ulang



Gambar 4.9 Siring

⁸⁸ Wawancara dengan H, Pustakawan Pertama dari Bagian Layanan Umum, 16 Januari 2023 pukul 12.18 WITA

Pada hasil dokumentasi di atas, pada gambar 4.8 merupakan rak buku yang sempit terendam banjir di tahun 2021. Setelah mendapatkan perbaikan melalui pengecatan ulang, rak buku tersebut kembali digunakan di ruang layanan anak. Adapun pada gambar 4.9 merupakan gambar selokan/siring yang dibangun di sekeliling lantai dasar gedung perpustakaan Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Provinsi Kalimantan Selatan.

4. Penyusunan Tata Bangunan di Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Provinsi Kalimantan Selatan

Dalam melakukan penyusunan tata bangunan perpustakaan di Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Provinsi Kalimantan Selatan dilakukan dengan memperhatikan aspek sisa ruang yang tersedia untuk membangun bangunan baru di perpustakaan. Hal ini disampaikan dalam wawancara dengan staf perpustakaan bagian perencanaan dan pelaporan berikut ini:

“Untuk pemilihan lokasi bangunan tidak berdasarkan perhitungan aspek risiko bencana karena keterbatasan ruang. Hanya memilih berdasarkan sisa tempat kosong yang tersedia untuk membangun gedung baru perpustakaan.”⁸⁹

Maksud dari wawancara tersebut adalah Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Provinsi Kalimantan Selatan masih belum melakukan penyusunan tata bangunan yang berdasarkan aspek risiko terhadap bencana. Pemilihan pengaturan tata bangunan perpustakaan, dalam hal ini untuk bangunan yang baru dibangun dilakukan dengan

⁸⁹ Wawancara dengan MGA, Staf Perpustakaan Bagian Perencanaan dan Pelaporan, 06 Januari 2023 pukul 10. 30 WITA.

memilih berdasarkan sisa ruang yang tersedia untuk membangun gedung perpustakaan disabilitas dan gedung teater di Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Provinsi Kalimantan Selatan.

5. Penyelenggaraan Pendidikan, Penyuluhan dan Pelatihan

Dalam penyelenggaraan pendidikan dan penyuluhan ini, Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Provinsi Kalimantan Selatan berkolaborasi dengan Dinas Arsip dan Perpustakaan Kota Banjarbaru untuk mengadakan program berupa sosialisasi penyelamatan arsip pasca bencana. Hal ini disampaikan dalam wawancara oleh staf perpustakaan bagian perencanaan dan pelaporan sebagai berikut:

“Ya ada, program penyelamatan arsip terhadap bencana berkolaborasi dengan Dinas Kearsipan. Kegiatannya sosialisasi mengundang dari ANRI sebagai pakar penyelamatan arsip melalui daring dan luring yang bertempat di Hotel Roditha Banjarbaru.”⁹⁰

Maksud dari wawancara di atas adalah program sosialisasi penyuluhan penyelamatan arsip pasca bencana tersebut dilakukan dengan kolaborasi bersama Dinas Arsip dan Perpustakaan Kota Banjarbaru yang masih satu unit dengan Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Provinsi Kalimantan Selatan. Program kegiatan ini turut mengundang dari ANRI langsung yang merupakan pakar dalam bidang kearsipan termasuk juga dalam penyelamatan arsip. Kegiatan ini dilaksanakan secara daring dan luring yang bertempat di hotel Roditha Banjarbaru pada tahun 2022.

⁹⁰ Wawancara dengan MGA, Staf Perpustakaan Bagian Perencanaan dan Pelaporan, 06 Januari 2023 pukul 10.35 WITA.

Hasil wawancara di atas didukung dengan hasil observasi peneliti melalui media *YouTube* bahwa sosialisasi tersebut memang terselenggara dan tetap dapat diakses melalui akun kanal *YouTube* Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Provinsi Kalimantan Selatan dengan nama pengguna Dispersip Prov.kalsel.



Gambar 4.10 Kegiatan sosialisasi penyelamatan arsip pasca bencana melalui media *YouTube*

Hasil dokumentasi di atas yaitu pada gambar 4.10 menunjukkan pelaksanaan kegiatan sosialisasi penyelamatan arsip pasca bencana yang berlangsung secara daring melalui media *YouTube* di kanal *YouTube* Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Provinsi Kalimantan Selatan. Pada sosialisasi di atas disebutkan bahwa perlindungan dan penyelamatan arsip merupakan langkah perlindungan dan penyelamatan arsip oleh negara sebagai bahan pertanggungjawaban nasional dari kemungkinan kehilangan, kerusakan arsip yang disebabkan oleh kerusakan alam, biologi, fisika dan tindakan terorisme dan lainnya.

Selain sosialisasi di atas, Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Provinsi Kalimantan Selatan juga turut memberikan pembinaan serta pengawasan kepada pustakawan dan staf perpustakaan terkait bencana banjir. Hal ini disampaikan dalam wawancara bersama staf perpustakaan bagian layanan anak sebagai berikut:

“Ada, nyata ada setelah ada banjir ini ada evaluasi seperti ‘bagaimana penanganan kita, apakah sudah terjamin kah, terus apa lagi yang harus kita giatkan?’ Itu dari atasan ya, tapi kalau tentang *talk show* virtual tentang bencana banjir itu kami ada di tahun 2021 itu *talk show* virtualnya di seluruh Indonesia. Dengan Perpusnas, BJB juga, sosialisasi tentang penyelamatan arsip.”⁹¹

Ditambahkan juga oleh pustakawan pertama dari bagian layanan anak yang menyatakan sebagai berikut:

“Terkait khusus sosialisasi bencana kayaknya tidak terlalu. Kalau pada saat kita melaksanakan seminar dan pada saat itu ada bencana atau apa, pastilah kita sosialisasikan juga. Untuk pustakawannya selalu diingatkan dari pimpinan bahkan setiap hari, selalu diingatkan antisipasi supaya jaga kesehatan, jaga kenyamanan bekerja.”⁹²

Maksud dari hasil wawancara di atas adalah bahwa Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Provinsi Kalimantan Selatan, tidak hanya melakukan sosialisasi terkait kebencanaan kepada khalayak umum saja namun juga secara khusus kepada karyawan, pustakawan dan staf perpustakaan di Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Provinsi Kalimantan Selatan pada saat pertemuan umum untuk selalu menjaga kesehatan dan

⁹¹ Wawancara dengan RS, Staf Perpustakaan Bagian Layanan Anak (Kids Library), 16 Januari 2023 pukul 11.23 WITA.

⁹² Wawancara dengan H, Pustakawan Pertama dari Bagian Layanan Umum, 16 Januari 2023 pukul 12.20 WITA

kenyamanan dalam bekerja termasuk dalam lingkungan pekerjaan sehingga dapat terhindar atau meminimalisir risiko bencana yang dapat terjadi kapan saja.

B. Pembahasan

Mitigasi merupakan serangkaian upaya untuk mengurangi risiko bencana baik melalui pembangunan fisik maupun peningkatan kemampuan dalam menghadapi ancaman bencana. Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Provinsi Kalimantan Selatan dalam menghadapi peristiwa banjir di tahun 2021 langsung melakukan tindakan pertolongan pertama dengan memindahkan buku-buku yang paling berisiko terendam banjir. Selain buku, fasilitas lain seperti komputer, meja, dan kursi juga dipindahkan ke tempat yang aman dari risiko banjir. Setelah buku-buku berhasil diamankan, Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Provinsi Kalimantan Selatan melakukan penyeleksian terhadap buku-buku tersebut dan untuk buku-buku yang sempat terendam banjir, dilaporkan ke bagian aset untuk diidentifikasi kembali kelayakan buku tersebut.

Berdasarkan hasil penelitian, tindakan pertolongan pertama yang dilakukan oleh Dinas Perpustakaan dan Kearsipan merupakan langkah yang tepat dengan menerapkan prioritas penyelamatan koleksi dan fasilitas yang ada di perpustakaan dan memiliki kesesuaian dengan pernyataan dari Apallidya Sitepu dan kawan-kawan dalam penetapan prioritas penyelamatan. Dalam merencanakan penanganan bencana, perpustakaan perlu menetapkan prioritas penyelamatan selain daripada keselamatan

staf, pustakawan, dan pemustaka prioritas penyelamatan koleksi dan fasilitas yang ada di perpustakaan.⁹³

Oleh karena peristiwa hujan deras yang mengakibatkan banjir berlangsung di malam hari, maka tidak ada pemustaka yang datang berkunjung pada waktu itu. Oleh sebab itu para staf dan pustakawan Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Provinsi Kalimantan Selatan langsung melakukan evakuasi terhadap buku-buku dan fasilitas lainnya pada ruang layanan anak yang terletak di lantai dasar Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Provinsi Kalimantan selatan.

Selain melakukan tindakan penyelamatan pada saat kejadian bencana sedang berlangsung, Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Provinsi Kalimantan Selatan melakukan perawatan terhadap buku-buku yang sempat terendam banjir. Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Provinsi Kalimantan Selatan juga melakukan perlindungan untuk keseluruhan bahan pustaka dan fasilitas yang ada dari risiko bencana lainnya dengan melakukan kegiatan fumigasi secara periodik. Fumigasi merupakan tindakan pengasapan yang untuk mencegah kerusakan pada bahan pustaka akibat rayap atau serangga. Tindakan fumigasi ini juga termasuk ke dalam bentuk mitigasi di perpustakaan yang bertujuan untuk mengurangi risiko terjadinya bencana di perpustakaan.

⁹³ Sitepu dkk., “Kesiapsiagaan dalam mengantisipasi bencana di perpustakaan dan pusat arsip,” hlm. 2-3.

Dalam pengurangan risiko bencana lainnya, Dinas perpustakaan dan Kearsipan Provinsi Kalimantan Selatan melakukan beberapa kegiatan terkait mitigasi bencana yaitu program sosialisasi penyelamatan arsip pasca bencana yang berkolaborasi dengan Dinas Arsip dan Perpustakaan Kota Banjarbaru, pengaturan pembangunan fisik terhadap bangunan baru di perpustakaan dengan mengatur pondasi dasar bangunan yang lebih tinggi dibandingkan bangunan lama, dan terhadap bangunan lama yang sudah terendam banjir diberikan penanganan dengan pengecoran lantai untuk mengantisipasi masuknya air ke lantai dasar di Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Provinsi Kalimantan Selatan.

Hasil penelitian mitigasi bencana di Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Provinsi Kalimantan Selatan memiliki kesesuaian dengan pengertian mitigasi itu sendiri berdasarkan Undang-Undang Nomor 24 yang menjelaskan bahwa mitigasi merupakan serangkaian upaya untuk mengurangi risiko bencana melalui pembangunan fisik maupun penyadaran dan peningkatan kemampuan menghadapi ancaman bencana.⁹⁴ Setelah secara langsung menghadapi peristiwa banjir di Tahun 2021, Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Provinsi Kalimantan Selatan mengadakan serangkaian upaya untuk meminimalisir risiko bencana di masa yang akan datang.

Dalam pelaksanaan program-program terkait mitigasi bencana di atas, Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Provinsi Kalimantan Selatan masih belum memiliki

⁹⁴ Indonesia, *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana*, hlm. 22.

standar operasional baku yang telah disahkan oleh pemerintah setempat. Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Provinsi Kalimantan Selatan, mengikuti arahan pimpinan untuk pelaksanaan kegiatan-kegiatan tersebut dengan bekerjasama dengan beberapa pihak seperti Lembaga Pemasarakatan, Dinas Sosial, Badan Penanggulangan Bencana Daerah, dan lain-lain.

Berdasarkan hasil analisis dapat disimpulkan bahwa Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Provinsi Kalimantan Selatan sudah melaksanakan beberapa upaya terkait mitigasi bencana melalui pembangunan fisik berupa peninggian pondasi dasar untuk bangunan baru dan pengecoran untuk lantai dasar bangunan perpustakaan sebagai upaya untuk meminimalisir risiko bencana. Selain itu dilaksanakan juga program sosialisasi tentang penyelamatan arsip pasca bencana sebagai upaya untuk penyadaran dan peningkatan kemampuan dalam menghadapi ancaman bencana.

Dalam pelaksanaan kegiatannya, mitigasi bencana dapat dilakukan melalui pembangunan fisik maupun penyadaran dan peningkatan kemampuan dalam menghadapi ancaman bencana. Kegiatan mitigasi bencana menurut Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 Pasal 47 Ayat 2 terdiri dari kegiatan atau upaya yaitu penataan ruang, pengaturan pembangunan, pembangunan infrastruktur, tata bangunan, dan penyelenggaraan pendidikan, penyuluhan dan pelatihan baik secara konvensional maupun modern.⁹⁵

⁹⁵ Indonesia, hlm. 22.

1. Penataan Ruang di Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Provinsi Kalimantan Selatan

Penataan ruang pada Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Provinsi Kalimantan Selatan sebelum dan setelah peristiwa banjir di tahun 2021 masih memiliki penataan yang sama baik untuk ruangan di lantai dasar yakni pada ruang layanan anak maupun ruang layanan perpustakaan lainnya. Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Provinsi Kalimantan Selatan lebih menekankan pada pengurangan risiko bencana. Beberapa tindakan pengurangan risiko yang dimaksudkan yaitu dengan melakukan pengecoran lantai atau menambah tinggi lantai dasar bangunan di ruang layanan anak sebagai ruang perpustakaan yang terdampak secara langsung bencana banjir di tahun 2021, memperbesar siring di sekeliling ruang perpustakaan untuk memperlancar aliran air, menanam pohon, membersihkan sampah dan memperbanyak bak sampah. Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Provinsi Kalimantan Selatan juga mengganti fasilitas-fasilitas yang rusak akibat bencana dan menggantinya dengan yang baru.

Berdasarkan hasil penelitian, Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Provinsi Kalimantan dalam hal penataan ruang masih menata ruangan dengan penataan yang sama seperti sebelum terjadi bencana. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 pasal 47 Ayat 2 menyebutkan bahwa salah satu kegiatan mitigasi bencana adalah dengan melakukan penataan ruang.⁹⁶ Maksud dari penataan ruang menurut Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 Pasal 1 adalah suatu sistem proses perencanaan tata ruang,

⁹⁶ Indonesia, hlm. 22.

pemanfaatan ruang, dan pengendalian ruang.⁹⁷ Melalui penataan ruang yang berbasis bencana kerugian yang diperoleh oleh suatu ruang akibat bencana dapat ditekan seminimal mungkin.

Berdasarkan hasil analisis di atas maka dapat disimpulkan bahwa Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Provinsi Kalimantan Selatan masih belum melakukan kegiatan penataan ruang di perpustakaan yang mengikuti Undang-Undang nomor 24 Tahun 2007 Pasal 47 Ayat 2 tentang kegiatan mitigasi bencana. Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Provinsi Kalimantan Selatan masih memberlakukan penataan ruang yang sama seperti sebelum kejadian bencana. Adapun yang menjadi pembeda dalam ruangan sebelum dan sesudah terjadi bencana adalah lantai yang dibuat menjadi lebih tinggi melalui pengecoran untuk mencegah masuknya air ke dalam ruangan serta penggantian dan penambahan fasilitas di perpustakaan.

2. Pengaturan Pembangunan Bangunan Perpustakaan di Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Provinsi Kalimantan Selatan

Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Provinsi Kalimantan Selatan membangun dua bangunan baru yaitu gedung teater dan gedung perpustakaan untuk disabilitas. Berkaca dari pengalaman bencana banjir yang melanda di awal tahun 2021, Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Provinsi Kalimantan Selatan membangun kedua bangunan baru tersebut dengan pondasi dasar yang lebih tinggi dibanding gedung-

⁹⁷ Presiden Republik Indonesia, *Undang-undang No 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang*, hlm. 35.

gedung dari bangunan lama. Hal ini dilakukan dengan tujuan untuk mengantisipasi risiko masuknya air ke dalam ruang perpustakaan apabila banjir terjadi.

Adapun untuk bangunan lama, pembangunan lebih diarahkan pada pengaturan perbaikan. Dinding yang sempat jebol diperbaiki ulang dan pada lantai dasar ruang layanan anak yang terendam banjir dilakukan pengecoran ulang untuk menambah tinggi lantai dibandingkan sebelum kejadian bencana.

Berdasarkan hasil penelitian, Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Provinsi Kalimantan Selatan telah melakukan beberapa pengaturan pembangunan terhadap bangunan-bangunan di perpustakaan untuk meminimalisir risiko bencana banjir. Hal tersebut sesuai dengan kegiatan mitigasi bencana yang disebutkan dalam Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 Pasal 47 Ayat 2 tentang kegiatan mitigasi bencana yaitu melalui pengaturan pembangunan.⁹⁸ Pembangunan merupakan sebuah proses ke arah yang lebih baik. Pembangunan secara fisik memiliki manfaat yang dapat dirasakan secara langsung oleh masyarakat.⁹⁹ Melalui pengaturan pembangunan berdasarkan mitigasi bencana maka kerugian yang diperoleh oleh suatu gedung atau bangunan akibat bencana dapat diminimalisir.

Berdasarkan hasil analisis di atas maka dapat disimpulkan bahwa Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Provinsi Kalimantan Selatan sudah melakukan pengaturan

⁹⁸ Indonesia, *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana*, hlm. 22.

⁹⁹ Kato dkk., *Manajemen Pembangunan Daerah*, hlm. 4.

pembangunan baik terhadap bangunan baru maupun lama. Untuk bangunan baru, pengaturan dilakukan pada pondasi dasar bangunan yang dibuat lebih tinggi dibandingkan dengan bangunan lama. Adapun untuk bangunan lama lebih diarahkan pada perbaikan pada dinding yang sempat jebol akibat banjir dan peninggian dasar lantai melalui pengecoran untuk mencegah masuknya air ke dalam bangunan atau gedung seperti sebelumnya.

3. Pembangunan Infrastruktur di Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Provinsi Kalimantan Selatan

Infrastruktur merupakan sistem fisik seperti jalan, bangunan, sistem pengairan dan fasilitas publik lainnya. Pembangunan infrastruktur di Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Provinsi Kalimantan Selatan pasca bencana banjir di tahun 2021 diantaranya adalah pembangunan siring, pengecoran lantai, dan pemasangan bata press. Adapun untuk fasilitas perpustakaan lainnya yang terdampak banjir seperti rak-rak buku, kursi, meja dan lain sebagainya diberikan perbaikan dan penggantian untuk yang sudah tidak bisa diperbaiki lagi.

Berdasarkan hasil penelitian, Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Provinsi Kalimantan Selatan telah melakukan pembangunan infrastruktur sebagai upaya untuk meminimalisir risiko bencana. Hal tersebut sesuai dengan kegiatan mitigasi bencana yang disebutkan dalam Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 Pasal 47 Ayat 2

tentang kegiatan mitigasi yaitu melalui pembangunan infrastruktur.¹⁰⁰ Pembangunan infrastruktur ini merupakan sebuah upaya untuk menopang kegiatan-kegiatan yang ada di Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Provinsi Kalimantan Selatan sekaligus untuk mengurangi risiko yang ditimbulkan akibat bencana.

Berdasarkan hasil analisis di atas dapat disimpulkan bahwa Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Provinsi Kalimantan Selatan sudah melakukan pembangunan infrastruktur di lingkungan perpustakaan sebagai upaya meminimalisir dampak akibat bencana. Pembangunan infrastruktur lebih difokuskan pada sekitar ruang layanan anak yang terdampak secara langsung bencana banjir di tahun 2021 seperti dengan membangun siring di sekeliling ruang layanan anak. Selain pembangunan siring, Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Provinsi Kalimantan Selatan melakukan pengecoran lantai ruang layanan anak untuk menghindari genangan air masuk ke dalam ruangan apabila banjir terjadi lagi. Perbaikan infrastruktur yang telah ada turut dilakukan di Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Provinsi Kalimantan Selatan. Dinding yang sempat jebol diperbaiki kembali dan rak-rak yang sempat terendam banjir di cat ulang untuk digunakan kembali di ruang layanan anak.

¹⁰⁰ Indonesia, *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana*, hlm. 22.

4. Penyusunan Tata Bangunan di Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Provinsi Kalimantan Selatan

Penataan bangunan tidak berbeda jauh dengan penataan ruang. Dalam hal penataan bangunan, Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Provinsi Kalimantan Selatan menata berdasarkan ketersediaan ruang yang tersisa di lingkungan Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Provinsi Kalimantan Selatan. Cara ini sudah digunakan pada pemilihan posisi atau letak bangunan baru di Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Provinsi Kalimantan Selatan yaitu gedung teater dan gedung perpustakaan disabilitas.

Berdasarkan hasil penelitian, Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Provinsi Kalimantan Selatan masih belum menerapkan penyusunan tata bangunan berdasarkan aspek risiko bencana. Hal tersebut tidak sesuai dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 Pasal 47 Ayat 2 yang menyebutkan bahwa kegiatan mitigasi bencana salah satunya yaitu melalui penyusunan tata bangunan.¹⁰¹ Melalui penataan bangunan perpustakaan dengan berlandaskan mitigasi bencana pemanfaatan suatu ruang bangunan atau antar bangun dapat ditata secara maksimal untuk dapat mengantisipasi risiko bencana.

Berdasarkan hasil analisis di atas maka dapat disimpulkan bahwa Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Provinsi Kalimantan Selatan masih belum melakukan kegiatan tata bangunan yang berlandaskan pada Undang-Undang Nomor 24 Tahun

¹⁰¹ Indonesia, hlm. 22.

2007 Pasal 47 Ayat 2 tentang kegiatan mitigasi bencana. Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Provinsi Kalimantan Selatan melakukan penataan bangunan terutama pada bangunan-bangunan yang baru di bangun dengan menyesuaikan ketersediaan ruang yang tersisa di lingkungan Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Provinsi Kalimantan Selatan.

5. Penyelenggaraan Pendidikan, Penyuluhan, Pelatihan

Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Provinsi Kalimantan Selatan yang masih satu unit dengan Dinas Arsip dan Perpustakaan Kota Banjarbaru mengadakan kolaborasi kegiatan sosialisasi penyelamatan arsip pasca bencana. Kegiatan ini merupakan salah satu bentuk penyelenggaraan pendidikan terkait penyelamatan pasca bencana meski bukan secara khusus membahas terkait mitigasi bencana di perpustakaan.

Penyelenggaraan kegiatan sosialisasi tersebut mengundang langsung pakar masalah kearsipan, yaitu badan Arsip Nasional Republik Indonesia atau lebih dikenal dengan sebutan ANRI. Kegiatan sosialisasi ini dilaksanakan secara daring dan luring bertempat di hotel Roditha dan masih bisa ditonton kembali melalui akun kanal *YouTube* Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Provinsi Kalimantan Selatan.

Selain sosialisasi di atas, Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Provinsi Kalimantan Selatan turut melakukan penyuluhan kepada pustakawan dan staf perpustakaan dengan selalu mengingatkan untuk menjaga kesehatan dan menjaga

kenyamanan bekerja. Tidak hanya itu, pimpinan Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Provinsi Kalimantan Selatan selalu mengadakan evaluasi terkait keadaan lingkungan Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Provinsi Kalimantan Selatan untuk memastikan penanggulangan risiko banjir sudah dilaksanakan secara maksimal.

Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Provinsi Kalimantan Selatan sudah melakukan kegiatan terkait pendidikan, penyuluhan dan pelatihan. Hal ini sesuai dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 Pasal 47 Ayat 2 tentang kegiatan mitigasi bencana meliputi penyelenggaraan pendidikan, penyuluhan dan pelatihan baik secara konvensional maupun modern.¹⁰² Melalui penyelenggaraan kegiatan ini diharapkan menumbuhkan kesadaran bagi masyarakat, khususnya pustakawan dan staf perpustakaan akan pentingnya kesiapsiagaan dalam menghadapi bencana.

Berdasarkan hasil analisis di atas dapat disimpulkan bahwa Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Provinsi Kalimantan Selatan sudah melaksanakan kegiatan pendidikan, penyuluhan, dan pelatihan terkait kebencanaan dengan berkolaborasi bersama dengan Dinas Arsip dan Perpustakaan Kota Banjarbaru. Meskipun bukan secara khusus membahas kegiatan mitigasi bencana di perpustakaan, tapi kegiatan ini juga menjadi sangat penting mengingat pentingnya arsip. Di samping itu, pimpinan Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Provinsi Kalimantan Selatan juga selalu memperhatikan kondisi lingkungan dan kesehatan para pustakawan dan staf perpustakaan serta turut

¹⁰² Indonesia, hlm. 22.

memastikan kesiapan perpustakaan dalam menghadapi ancaman bencana banjir untuk dapat meminimalisir dampak bencana di perpustakaan.

Berdasarkan keseluruhan hasil analisis di atas dapat disimpulkan bahwa Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Provinsi Kalimantan Selatan sudah melakukan serangkaian upaya untuk mengurangi risiko akibat bencana banjir sekaligus tanggap darurat ketika terjadinya bencana. Selain itu Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Provinsi Kalimantan Selatan sudah cukup baik dalam melaksanakan kegiatan mitigasi bencana berlandaskan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 Pasal 47 Ayat 2 meliputi penataan ruang, pengaturan pembangunan, pembangunan infrastruktur dan penataan bangunan serta penyelenggaraan pendidikan, penyuluhan dan pelatihan baik secara konvensional maupun modern. Meskipun masih terdapat beberapa aspek yang perlu diperhatikan dan ditinjau kembali oleh Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Provinsi Kalimantan Selatan agar dapat melaksanakan kegiatan mitigasi bencana sekaligus memaksimalkan upaya dalam pengurangan risiko akibat bencana.

C. Gambaran Umum Objek Penelitian

1. Sejarah Singkat Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Provinsi Kalimantan Selatan

Dinas Perpustakaan dan Kearsipan (Dispersip) Provinsi Kalimantan Selatan sebagai Lembaga Teknis Daerah Provinsi Kalimantan Selatan dibentuk dengan Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 6 Tahun 2008 Tanggal 15 April

2008 dan diundangkan dalam Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2008 Nomor 6 Tanggal 16 April 2008 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata kerja Perangkat Daerah Provinsi Kalimantan Selatan. Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Provinsi Kalimantan Selatan merupakan hasil integrasi eks Perpustakaan Nasional Provinsi Kalimantan Selatan (instansi vertikal Perpustakaan-RI) dengan Kantor Arsip Daerah Provinsi Kalimantan Selatan.

Sejarah Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Provinsi Kalimantan Selatan berawal pada Tahun 1959 dengan nama Perpustakaan Negara Banjarmasin berdasarkan SK Menteri PP dan K Nomor 29103/S tanggal 23 Mei 1959. Pada tahun 1978 status Perpustakaan Negara ditingkatkan menjadi Perpustakaan Wilayah Provinsi Kalimantan Selatan melalui Surat Keputusan Mendikbud Nomor 0199/0/1978 tanggal 23 Juni 1978, menempati gedung eks Kanwil Depdikbud Provinsi Kalimantan Selatan di Jalan Kapten Piere Tendean 106 Banjarmasin.

Seiring dengan lahirnya Keppres Nomor 11 Tahun 1989 tanggal 6 Maret 1989 tentang Perpustakaan Nasional, maka ditetapkanlah Perpustakaan Daerah Provinsi Kalimantan Selatan berdasarkan Surat Keputusan Kepala Perpustakaan Nasional RI Nomor 001/Org/9/90 tanggal 21 September 1990 tentang Organisasi dan Tata Kerja Perpustakaan Nasional RI yang berlangsung sampai pada tahun 1997. Kemudian pada tahun 1997 terbit kembali Keppres Nomor 50 Tahun 1997 tentang Perpustakaan Nasional RI yang merupakan penyempurnaan Keppres Nomor 11 Tahun 1989. Sejalan dengan Keppres tersebut keluar keputusan Kepala Perpustakaan Nasional RI Nomor

44 Tahun 1998 tentang Organisasi dan Tata Kerja Perpustakaan Nasional RI yang mengukuhkan berdirinya Perpustakaan Nasional Provinsi Kalimantan Selatan.

Kemudian pada tahun 2001 dibentuk Badan Perpustakaan dan Arsip Daerah Provinsi Kalimantan Selatan (Bapustarda) sebagai Lembaga Teknis Daerah berdasarkan Perda Nomor 23 Tahun 2001 tanggal 8 November 2001 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi dan Tata Kerja Badan Perpustakaan dan Arsip Daerah Provinsi Kalimantan Selatan. Bapustarda Provinsi Kalimantan Selatan merupakan hasil integrasi eks Perpustakaan Nasional Provinsi Kalimantan Selatan (instansi vertikal non-departemen) dengan Kantor Arsip Daerah Provinsi Kalimantan Selatan. Setelahnya pada tahun 2004 sebagai tahun dimulainya pelaksanaan Otonomi Daerah di seluruh Indonesia dengan keluarnya Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2006 tentang Pemerintah Daerah dan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Pusat dan Daerah, dengan sendirinya tatanan sistem pemerintahan daerah berubah dari sistem sentralistik menjadi desentralisasi. Keadaan ini mengharuskan pembentukan Satuan-Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) di lingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan termasuk di dalamnya Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Provinsi Kalimantan Selatan.

2. Visi dan Misi Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Provinsi Kalimantan Selatan

a. Visi

“Pemberdayaan Perpustakaan dalam rangka mencerdaskan masyarakat dan arsip sebagai bukti pertanggungjawaban kepada generasi penerus.” Dari visi ini ingin dirumuskan cita-cita dan keinginan Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Provinsi Kalimantan Selatan untuk memberdayakan semua jenis perpustakaan yang ada di Kalimantan Selatan agar terciptanya masyarakat yang senang belajar dan gemar membaca serta masyarakat yang sadar akan arti pentingnya selemba arsip untuk dilestarikan dalam semua aspek kehidupan masyarakat sehingga akan terkumpul menjadi bukti sejarah perjalanan bangsa.

b. Misi

Misi yang akan menjadi landasan semangat kerja Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Provinsi Kalimantan Selatan adalah:

- 1) Melaksanakan pembinaan, pengembangan dan pemberdayaan semua jenis perpustakaan dan arsip.
- 2) Melaksanakan pelayanan informasi ilmu pengetahuan, teknologi dan kebudayaan.

- 3) Mengumpulkan dan melestarikan hasil budaya bangsa berupa karya cetak, rekam, dan arsip statis.
- 4) Meningkatkan budaya baca dan budaya arsip dengan melibatkan semua unsur masyarakat.
- 5) Pembentukan jaringan kerjasama perpustakaan, dokumentasi, informasi dan kearsipan.
- 6) Mengelola arsip in aktif yang berasal dari dinas, badan, kantor di lingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan untuk menjadi khasanah daerah.
- 7) Melaksanakan penyelamatan dan pelestarian arsip statis melalui kegiatan akuisisi dan alih media.

3. Struktur Organisasi Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Provinsi Kalimantan Selatan

